



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2019/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan TK2D Desa Bumi Rapak, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Danau Toba 1, RT. 05, Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Mesjid, RT.15, No. 17, Kelurahan Sanga-Sanga Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 04 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 04 Juli 2019 dalam register perkara Nomor 335/Pdt.G/2019/PA Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Putusan Cerai Gugat Nomor 335/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 1 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

038/01/V/2012, tanggal 12 Mei 2012, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

2. Bahwa, sebelum menikah penggugat berstatus perawan, dan tergugat berstatus jejak.

3.-----

Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kecamatan Sanga-Sanga Kutai Kartanegara selama 1 tahun, kemudian penggugat dengan tergugat pindah kerumah orang tua penggugat sesuai alamat penggugat tersebut diatas selama 3 tahun.

4.-----

Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. anak, umur 7 tahun.
- b. anak, umur 3 tahun, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh penggugat.

5.-----

Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2015, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan tergugat sering menuduh penggugat selingkuh dengan lelaki lain, bahkan tergugat pernah menuduh penggugat saat penggugat hamil anak kedua, mengklaim bahwa kehamilan penggugat tersebut, bukan dari hubungan dengan tergugat, melainkan dengan lelaki lain.

6.-----

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2016 setelah anak kedua lahir, tergugat masih sering menuduh penggugat, dan setelah perselisihan tersebut tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan semenjak kepergian tergugat tersebut, tergugat pernah sekali kembali saat anak kedua khitanan, setelah itu pergi lagi dan tidak pernah kembali hingga sekarang.

Putusan Cerai Gugat Nomor 335/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 2 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa, penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2016 hingga sekarang.

8.-----

Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

9.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Sgta, tanggal 18 Juli dan 13 Agustus 2019, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang

Putusan Cerai Gugat Nomor 335/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 6408154103850001, tanggal 5 Juni 2013, A.N. Susanti, yang dikeluarkan Kabupaten Kutai Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 038/01/V/2012 tertanggal 12 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Durian RT. 2 RW 1 Desa Bumi Jaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi mengenal Tergugat bernama Dedi Ardiansyah sebagai suami Penggugat;

Putusan Cerai Gugat Nomor 335/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 4 dari 12 halaman



-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Sanga-Sanga Kutai Kartanegara;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----B  
ahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu rukun-rukun saja kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering bertengkar;

-----B  
ahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sekitar sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tiga tahun yang lalu, karena Penggugat sekarang tinggal di Kecamatan Kaibun sedangkan Tergugat tetap tinggal dan bekerja di Kecamatan Sanga-Sanga Kutai Kartanegara;

-----B  
ahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2.-----S  
aksi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cempaka RT. 5 RW 3 desa Bumi Jaya Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi mengenal Tergugat bernama Dedi Ardiansyah sebagai suami Penggugat;



-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Sanga-Sanga Kutai Kartanegara;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----B  
ahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu rukun-rukun saja kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering bertengkar;

-----B  
ahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sekitar sejak tahun 2015;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016 karena Penggugat sekarang tinggal di Kecamatan Kaibun sedangkan Tergugat tetap tinggal dan bekerja di Kecamatan Sanga-Sanga Kutai Kartanegara;

-----B  
ahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Putusan Cerai Gugat Nomor 335/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 6 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) Rbg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2015, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan tergugat sering menuduh penggugat selingkuh dengan lelaki lain, bahkan tergugat pernah menuduh pengugat saat penggugat hamil anak kedua, mengklaim bahwa kehamilan penggugat tersebut, bukan dari hubungan dengan tergugat, melainkan dengan lelaki lain;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2016 setelah anak kedua lahir, tergugat masih sering menuduh penggugat, dan setelah perselisihan tersebut tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan semenjak kepergian tergugat tersebut, tergugat pernah sekali kembali saat anak kedua khitanan, setelah itu pergi lagi dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
3. Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Putusan Cerai Gugat Nomor 335/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 7 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 6408154103850001, tanggal 5 Juni 2013, A.N. Susanti dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 038/01/V/2012 tertanggal 12 Mei 2012, Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan

Putusan Cerai Gugat Nomor 335/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 8 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering bertengkar, Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sekitar sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016 karena Penggugat sekarang tinggal di Kecamatan Kaubun sedangkan Tergugat tetap tinggal dan bekerja di Kecamatan Sanga-Sanga Kutai Kartanegara, saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

2.-----B

ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering bertengkar, Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak

Putusan Cerai Gugat Nomor 335/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 9 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 karena Penggugat sekarang tinggal di Kecamatan Kaibun sedangkan Tergugat tetap tinggal dan bekerja di Kecamatan Sanga-Sanga Kutai Kartanegara, saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering bertengkar, Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016 karena Penggugat sekarang tinggal di Kecamatan Kaibun sedangkan Tergugat tetap tinggal dan bekerja di Kecamatan Sanga-Sanga Kutai Kartanegara, saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995

Putusan Cerai Gugat Nomor 335/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 10 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan

Putusan Cerai Gugat Nomor 335/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 11 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Peggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Rbg. gugatan Peggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap peggugat (Peggugat);
4. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Peggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Cerai Gugat Nomor 335/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 12 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Wafiroh, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.800.000,-
4. Biaya PNBPN	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.916.000,-

Terbilang : (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).



Putusan Cerai Gugat Nomor 335/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 14 dari 12 halaman